

## Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren pada Masa Pra Kemerdekaan Indonesia

Aidatun Nisrina Nurul Firdaus<sup>1</sup>M. Effendi<sup>3</sup>Fajarullah Alghifari<sup>4</sup>Sriyono Fauzi

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Institut Islam Mambaul'ulum

[aidatunfirdaus13@gmail.com](mailto:aidatunfirdaus13@gmail.com)<sup>1</sup>; [meffendi13@guru.smp.belajar.id](mailto:meffendi13@guru.smp.belajar.id)<sup>2</sup>; [hufadz13@gmail.com](mailto:hufadz13@gmail.com)<sup>3</sup>;  
[sriyonofauzi@gmail.com](mailto:sriyonofauzi@gmail.com)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. Sadewa No.14, Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155  
Korespondensi penulis: [aidatunfirdaus13@gmail.com](mailto:aidatunfirdaus13@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses Islamic education policies in Indonesia during the pre-independence period with a specific focus on pesantrens as centers of education and resistance against colonialism. Dutch colonial government policies tended to neglect and suppress Islamic education, which motivated pesantrens to uphold their existence. Pesantrens not only taught religious knowledge but also general sciences, shaping national character and identity, and producing many national movement figures. The article also explores the history of pesantrens, their contribution to the independence struggle, and their conditions under Dutch and Japanese occupations. Despite facing various challenges and pressures, pesantrens remained independent educational institutions that significantly contributed to shaping a nationalist and religiously-minded younger generation.*

**Keywords:** *Education policy, Pesantren, Pre-independence*

**Abstrak:** Artikel ini membahas kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada masa pra kemerdekaan dengan fokus khusus pada peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda cenderung mengabaikan dan menekan pendidikan Islam, yang justru memotivasi pesantren untuk mempertahankan eksistensinya. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum, membentuk karakter dan identitas bangsa, serta melahirkan banyak tokoh pergerakan nasional. Artikel ini juga mengulas sejarah pesantren, kontribusi pesantren dalam perjuangan kemerdekaan, dan kondisi pesantren selama penjajahan Belanda dan Jepang. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan tekanan, pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang independen dan berkontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang berjiwa nasionalis dan religius.

**Kata kunci:** Kebijakan pendidikan, Pesantren, Pra kemerdekaan

### PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan keputusan yang memiliki suatu karakteristik. Kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan di suatu negara. Interpretasi kebijakan selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada implementasi. Perwujudan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk peraturan pemerintah seperti GBHN, TAP MPR, UU tentang pendidikan. Yang kedua dalam sikap pemerintah, terutama dari Menteri Pendidikan yang meliputi sikap formal yang dituangkan melalui SK atau Permen, dan sikap non-formal seperti komentar, pernyataan, atau anjuran tentang hal yang berkaitan dengan pendidikan nasional.

Pesantren merupakan pusat penyebaran Islam oleh para wali yang merupakan kelanjutan dari sistem Zawiyah dari India dan Timur Tengah. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu

sendiri. Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dikategorikan dalam empat periode antara lain, periode pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi. Dalam pembahasan makalah ini hanya akan difokuskan pada kebijakan pemerintah pada pesantren pada masa pra kemerdekaan.

Pada periode pra kemerdekaan pesantren berperan penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Pesantren menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama akan tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu cenderung mengabaikan pendidikan Islam dan lebih fokus pada pendidikan yang menguntungkan kepentingan colonial akan tetapi pesantren tetap eksis dan menjadi benteng pertahanan budaya dan agama. Kebijakan pemerintah kolonial sering kali bertentangan dengan kepentingan pesantren, namun dengan semangat perjuangan, pesantren tetap mampu bertahan dan berkembang.

Banyak tokoh pergerakan nasional yang berasal dari pesantren yang kemudian menjadi pelopor dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan tekanan dari pemerintah kolonial pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang independen dan berkontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang berjiwa nasionalis dan religius. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pendidikan Islam justru memacu semangat para pengasuh pesantren untuk terus berinovasi dan mempertahankan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unggul.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Sejarah Pesantren**

Pesantren awalnya merupakan pusat penyebaran Islam oleh para wali yang merupakan kelanjutan dari sistem Zawiyah di India dan Timur Tengah. Pondok pesantren atau pesantren dalam sejarah Indonesia khususnya dalam pendidikan Islam, memiliki peran yang sangat signifikan. Pesantren merupakan institusi pembentuk kebudayaan Islam di Indonesia. Keberadaannya cukup mengakar di masyarakat Indonesia. Selain sebagai pendidikan, pesantren berperan sebagai agen transformasi kultural yang dapat membawa pesan solidaritas dan perdamaian. Sistem pesantren bermula dari pengakuan masyarakat terhadap seorang kyai sehingga banyak masyarakat yang berdatangan pada kyai, selanjutnya orang yang belajar disebut santri. Keunikan pesantren tersebut menyangkut tata nilai, cara dan pandangan hidup, serta hirarki kekuasaan tertentu di antara santri dan kiai serta masyarakat sekitarnya.

Dalam sejarahnya, pesantren mempunyai peran penting yang berpengaruh dalam perjuangan bangsa dan mempunyai hubungan harmonis dengan penguasa. Menurut Abdurrohman Mas'ud, periode Walisongo hingga Sultan Agung pada abad XVII menunjukkan hubungan harmonis antara pesantren dan istana. Hal ini dapat dilihat dari struktur pendidikan Islam pada periode Sultan Agung sebagai berikut. Pesantren Takkhasus memiliki spesifikasi pada pengetahuan keislaman dan tarekat. Di pesantren ini, para santri mempelajari pelajaran khusus secara mendalam serta belajar tarekat tertentu khususnya Qodariyah, Naqsabandiyah, dan Syatiriyah, yang merupakan tingkat tertinggi dari pendidikan pesantren. Pesantren Besar dan Umum menawarkan mata pelajaran seperti Fiqih, Tafsir, Hadits, Tauhid, Astronomi, Tata Bahasa Arab, dan Tasawuf, yang termasuk dalam tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan Pesantren Daerah dengan kitab-kitab elementer mengajarkan kitab-kitab fiqh dengan penekanan pada madzhab asy-Syafi'i seperti Fathul Qorib, serta dasar-dasar akhlak seperti Bidayah al-Nihayah yang ditulis oleh al-Ghazali, yang merupakan tingkat pendidikan menengah. Kelas-kelas al-Qur'an di berbagai tempat bagi anak-anak bertujuan untuk membekali para santri dengan kemampuan membaca al-Qur'an hingga tamat, yang termasuk dalam tingkat pendidikan dasar.

Pesantren juga berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Dengan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada ajaran Islam, pesantren tidak hanya mendidik para santri dalam bidang agama tetapi juga membekali mereka dengan nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, pesantren juga menjadi tempat pembentukan karakter dan kepribadian santri sehingga mereka dapat menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Hingga saat ini, pesantren tetap eksis dan berkembang seiring dengan perubahan zaman, tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan perkembangan modern.

#### b. Kondisi Pesantren Pra Kemerdekaan

Pada masa penjajahan Belanda, landasan idil pendidikan hanya dalam rangka memenuhi tenaga buruh untuk kepentingan modal sehingga tidak begitu jelas dasarnya. Pemerintah Belanda menjalankan politik pendidikan separuh hati karena mereka tidak menginginkan pribumi memiliki kecakapan intelektual. Pendidikan yang diselenggarakan hanya mempersiapkan pekerja-pekerja teknis untuk kepentingan kolonialisme Belanda. Nasution (2011: 10) menjelaskan bahwa beberapa ciri umum politik pendidikan pemerintah Belanda adalah: gradualisme pendidikan bagi anak putra pribumi; dualisme dalam pendidikan dengan

menekankan perbedaan tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi; kontrol pusat yang kuat; keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan; prinsip konkordasi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan negeri Belanda; dan tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis.

Pada masa ini juga pesantren dicurigai, ditekan, dan diintimidasi (Kraemer, 1952). Menurut Dawam Rahardjo dalam bukunya "Dunia Pesantren," hal ini dikarenakan pesantren merupakan pusat perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Anthony Reid mencatat bagaimana takutnya pemerintah Belanda terhadap pembelajaran Islam yang disebarkan para ulama. Pembelajaran Islam dianggap hanya menanamkan rasa benci dan kutukan terhadap kaum kafir. Sehingga, pemerintah Belanda merasa perlu untuk membentuk sekolah dengan sistem pemerintah untuk mendisiplinkan rakyat. Di Jawa, tekanan kolonial Belanda membuat pesantren mengundurkan diri dan menampilkan perlawanan dengan berada jauh di pusat pemerintahan kolonial, sehingga pesantren berada di pelosok kampung yang sulit dijangkau. Walaupun pesantren mengasingkan diri dari keramaian, mereka juga mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan memantapkan pelajaran jihad dan pelatihan fisik.

Dalam buku Sejarah Pendidikan Islam dijelaskan bahwa sikap perlawanan pesantren terhadap pemerintah kolonial menyebabkan dikeluarkannya peraturan yang membatasi ruang gerak pendidikan agama, seperti keharusan izin dari pemerintah. Langgar, surau, madrasah, dan pesantren diawasi oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai tempat kaderisasi para pemberontak. Pada tahun 1882 M, pemerintah kolonial Belanda membentuk Priesterraden, sebuah lembaga yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam (Mubagid, 1997: 149). Mubagid menerangkan bahwa pada tahun 1905, Lembaga Priesterraden memberikan rekomendasi kepada kolonial bahwa orang yang memberikan pengajian agama harus memiliki izin pemerintah kolonial terlebih dahulu. Pada tahun 1925 M, kolonial mengeluarkan peraturan lebih ketat bahwa tidak semua kyai boleh memberikan pengajian agama. Puncaknya pada tahun 1932 M, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan bahwa Belanda dapat menutup sekolah, madrasah, pesantren jika memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah. Peraturan ini dikenal dengan nama Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*).

Karena Politik Etis Belanda poin penting kebijakan pemerintah kolonial Belanda adalah: pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan

penduduk Bumi putera. Untuk itu, bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah; pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumi putera disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Azra (1997) menjelaskan bahwa modernisasi pendidikan yang diinginkan Belanda terhadap penduduk pribumi dilakukan dengan mendirikan *volkschoolen*, Sekolah Rakyat, atau Sekolah Desa (nagari) dengan masa belajar tiga tahun (Azra, 1997: xv). Namun, menurut Azyumardi Azra, sekolah umum yang didirikan Belanda ini mendapat resistensi dari masyarakat pribumi karena mereka beranggapan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial hanya untuk “membelandakan” anak mereka.

Di Minangkabau surau yang merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional ditransformasikan secara formal menjadi sekolah nagari. Namun, sekolah nagari yang awalnya adalah surau tersebut tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menstandarkan kurikulum dan metode pengajarannya. Di Bukit Tinggi pada tahun 1850, pemerintah Belanda mendirikan HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*), yang kemudian dikenal sebagai Sekolah Raja (Azra, 1997). Dari namanya saja dapat dilihat bahwa sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda ini khusus untuk anak-anak bangsawan. Sistem pendidikan pemerintah Belanda yang diskriminatif menyebabkan melebarnya jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elit tradisional, priyayi, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Indonesia berpendidikan Barat. Hasbullah mengatakan bahwa dengan adanya Politik Islam dan Politik Pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang menomorsatukan anak-anak pejabat dan pembesar mengakses pendidikan, sementara membatasi putra pribumi dengan mengarahkannya ke pesantren, justru memperkuat dasar agama Islam masyarakat (Hasbullah, 1995: 55). Menurut Nurcholish Madjid, Politik Etis Belanda pada dasarnya hanya bertujuan ekonomi, politik, dan sosial, sehingga berdampak banyak pribumi yang masuk sekolah umum.

Pada periode pra kemerdekaan kebijakan pesantren mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama pada masa penjajahan Jepang. Jepang, yang memiliki misi untuk membentuk Asia Timur Raya demi memenangkan perang, berusaha merebut simpati masyarakat Indonesia melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan merubah Kantor Urusan Agama (*Kantoor voor Islamistische Saken*) yang dibentuk pada masa Belanda menjadi Kantor Sumubi. Kantor ini dipimpin oleh ulama Islam Indonesia, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari. Pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari Jepang,

serta sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama (Zuhairini, 2010; 153).

Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah yang dipimpin oleh K.H. Zainul Arifin, yang aktivitasnya mencakup latihan dasar kemiliteran. Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Muhammad Hatta. Para ulama bekerja sama dengan pemimpin nasionalis diizinkan untuk mendirikan barisan Pembela Tanah Air, serta umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia (Zuhairini, 2010; 153).

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an, Jepang merencanakan pendirian “Kemakmuran Bersama Asia Raya”. Untuk mewujudkan tujuan ini, ideologi pendidikan yang diterapkan adalah *Hakko Ichiu*, dengan tujuan utama pendidikan Jepang adalah memenangkan perang. Pelajar dipersiapkan untuk perang dengan aktivitas di sekolah yang lebih banyak berfokus pada latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi “Asia untuk Bangsa Asia.” Sistem pendidikan yang telah dibangun oleh Belanda sebagian besar diubah, termasuk satuan-satuan pendidikannya, namun beberapa institusi tetap dipertahankan, seperti Sekolah Tinggi Kedokteran (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta dan Sekolah Teknik Tinggi (*Kogyo Dai Gakko*) di Bandung. Akses pendidikan juga dibuka luas, menghapus segregasi sosial yang ada sebelumnya. Sekolah-sekolah diseragamkan menjadi sekolah negeri, namun sekolah Muhammadiyah dan Taman Siswa tetap berkembang dengan pengawasan Jepang.

Selama kedudukan Jepang (1942-1945) pemerintah Jepang kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan di pesantren dan madrasah. Ma'arif tetap dapat bergerak walau terbatas dalam mengelola pondok pesantren dan madrasah. Menurut Zuhairini, ketika sekolah non pesantren dilatih baris berbaris, romusha, dan latihan fisik, pesantren relatif terlepas dari kegiatan ini, sehingga proses belajar di pesantren berjalan relatif lancar (Zuhairini, 2010; 153). Sebagai lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari NU, Ma'arif pada masa pendudukan Jepang telah memiliki berbagai jenis madrasah, seperti Madrasah Menengah (Madrasah Mu'allimin Mustha), Madrasah Guru Atas (Madrasah Mu'allimin Ulya), Madrasah Tjjarah (Sekolah Ekonomi Dagang), Sekolah Pertukangan (Madrasah Shina'ah), dan Sekolah Pertanian (Madrasah Zira'ah). Uniknya, pendidikan kejuruan yang dikelola oleh Ma'arif sebenarnya tidak diizinkan untuk didirikan, namun karena Jepang tidak begitu peduli dengan lembaga pendidikan Islam, maka madrasah Ma'arif tetap berjalan.

## KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia khususnya kebijakan pendidikan Islam, telah mengalami berbagai dinamika dari periode pra kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa pra kemerdekaan, pesantren memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa, meskipun sering kali berhadapan dengan kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung mengabaikan pendidikan Islam. Pesantren tetap eksis dan berkembang sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum, meskipun menghadapi tekanan dan intimidasi dari pemerintah kolonial. Politik pendidikan Belanda yang diskriminatif, bertujuan untuk menjaga kekuasaan kolonial dengan membatasi akses pendidikan bagi pribumi, justru memacu pesantren untuk terus bertahan dan berinovasi. Pesantren menjadi benteng perlawanan dan tempat kaderisasi tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masa pendudukan Jepang membawa perubahan signifikan dengan adanya simpati dan dukungan terhadap pesantren, namun tetap dengan agenda tersendiri untuk memenangkan perang. Secara keseluruhan, pesantren menunjukkan ketahanan dan adaptabilitasnya dalam berbagai kondisi, menjadi lembaga pendidikan yang independen dan unggul dalam membentuk generasi muda yang nasionalis dan religius. Kebijakan yang tidak mendukung pendidikan Islam justru memperkuat semangat juang pesantren untuk terus berperan penting dalam membentuk budaya dan identitas bangsa.

## Saran

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi mendalam dan wawasan terkait kebijakan pemerintah terhadap pesantren pada masa pra kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah A. 2013. *Perkembangan Pesantren dan Madrasah di Indonesia dari masa kolonial sampe orde baru*. Universitas veteran republik Indonesia Makassar
- Arifin Z. 2012. *Perkembangan Pesantren di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Dirjen Kelembagaan Islam. 2003. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Depag RI
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik (Terj.)*, Yogyakarta: UGM Press
- Fadjan A. 1991. *Peradaban dan pendidikan Islam*. Jakarta: CV.Rajawali
- Fadli a. 2012. *Pesantren: Sejarah dan Perkembangannya*. Tarbiyah IAIN Mataram

- Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada dan LSIK
- Mustafa, A., Aly, Abdullah. 1998. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Rahardjo, M. Dawam (Ed.). 1985. *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES
- Syafe'i I. 2017. *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter* . Lampung
- Zulhimma. 2013. *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia*. Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 01, No. 02